



## Impelementasi Kebijakan Pembuatan Gorong - Gorong Sebagai Upaya Penanganan Banjir Di Kecamatan Tuminting Kota Manado

Sitty Marwah Putri Saleh

Joyce J. Rares

Very Londa

JAP No.2 Vol. X (2024)  
Hal. 21- 29  
Publish. 23 Mei 2024

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait Implementasi Kebijakan Pembuatan Gorong-gorong Dalam upaya penanganan banjir di kecamatan tuminting Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Tuminting belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini ditemukan melalui hasil observasi dan wawancara yakni adanya pembongkaran rumah terhadap kebijakn tersebut membuat masyarakat rugi, sangat di harapkan kepada pemerintah Lakukan Pengawasan terhadap gorong-gorong yang ada, termasuk pembersihan agar tidak tersumbat oleh sampah atau material lainnya. pastikan sistem drainase secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan tidak ada bagian yang rusak dan kepada masyarakat lebih mendengarkan himbauan dari pemeritah dan selalu menjaga kebersihn agar tidk terjadi banjir di Kecamatan Tuminting Kota Manado.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan, Banjir**

### ABSTRACT

The aim of this research is to find out about the implementation of the policy for making culverts in efforts to handle floods in the Tuminting sub-district, Manado City. This research uses a qualitative descriptive research type using Policy Implementation Theory by Van Meter Van Horn. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results of the research found that the Manado City Government's flood management policy in Tuminting District has not been implemented comprehensively. This was discovered through the results of observations and interviews, namely that the demolition of houses due to this policy caused losses to the community. It is highly hoped that the government will carry out monitoring of existing culverts, including cleaning them so that they are not blocked by rubbish or other materials. ensure that the drainage system as a whole functions well and that no parts are damaged and that the community listens to the government's advice and always maintains cleanliness so that flooding does not occur in Tuminting District, Manado City.

**Keywords: Policy Implementation, Mitigation, Flood**





## PENDAHULUAN

Kota Manado secara geografi terletak pada bagian utara pulau Sulawesi merupakan daerah yang rentan bencana, seperti tragedi bencana banjir pada awal Tahun 2023 yang telah melanda sebagian besar Provinsi Sulawesi Utara masih menyisakan duka dan juga kerugian besar bagi masyarakat korban bencana banjir. Wilayah yang rentan umumnya terletak di daerah aliran sungai, Kota Provinsi Sulawesi Utara memiliki empat sungai besar, diantaranya Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, dan Sungai Sario. Dalam waktu singkat di beberapa daerah dataran rendah dan yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) berpotensi terjadi peluapan air Sungai dan terjadi banjir diberbagai titik di Kota Manado. Salah satu sungai yang pernah meluap dan mengakibatkan banjir bandang di Kota Manado yaitu Sungai Tondano. Sungai Tondano berasal dari Danau Tondano mengalir ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Sawangan Air Madidi, Kombos, Wenang Permai, Paal dua lalu masuk ke Kota Manado

Kecamatan Tuminting yang merupakan salah satu yang sering mengalami banjir di Kota Manado, memiliki luas sekitar 403,57Ha serta memiliki luas daerah banjir 15Ha hal ini disebabkan sebagian wilayah Kecamatan Tuminting berada di kawasan daerah aliran sungai dan beberapa berada di dataran rendah atau padat penduduk.

Di Indonesia, banjir sering terjadi karena curah hujan yang tinggi, naiknya permukaan air sungai, dan kurangnya fasilitas drainase yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan intensitas banjir di berbagai daerah telah meningkat, yang menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negative salah satu solusi yang telah diidentifikasi dalam pengelolaan banjir adalah membuat saluran pembuangan atau sistem drainase yang efisien.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan

bahkan hilangnya nyawa. Di berbagai wilayah di Indonesia, banjir menjadi ancaman yang nyata dan terjadi secara berulang, terutama akibat tingginya curah hujan dan kurangnya sistem drainase yang memadai. Salah satu solusi yang telah diidentifikasi untuk mengurangi dampak banjir adalah pembuatan gorong-gorong atau sistem drainase yang efektif.

Gorong-gorong memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan dari permukaan jalan, pemukiman, dan area lainnya ke sungai atau laut, sehingga mengurangi risiko genangan dan banjir. Dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat, serta perubahan iklim yang dapat meningkatkan intensitas curah hujan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memitigasi dampak banjir dan melindungi masyarakat serta lingkungan dari risiko tersebut.

Pada dasarnya terdapat berbagai kebijakan yang berkaitan erat dan mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana, salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan Tata Ruang. Mengenai hal iniberkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Manado Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, Rencana pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap kawasan-kawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Manado, terdiri dari : 1) Pembuatan kolam-kolam resapan air di kawasan Sungai Bailang dan Sungai Sario, juga akan dikembangkan di kawasan Kecamatan Tuminting untuk mengendalikan luapan air hujan akibat kondisi drainase yang tidak memadai. 2) Perbaikan sistem drainase dengan rencana penyusunan master plan rencana induk drainase untuk seluruh wilayah Kota Manado.

Kebijakan penanggulangan Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR) saat ini sedang membangun gorong-gorong raksasa sebagai upaya mengatasi bencana banjir di wilayah



Kecamatan Tuminting. Kepala Dinas (PUPR) Kota Manado (John Suwu) kepada media ini menyampaikan, pembangunan gorong-gorong raksasa bertujuan untuk menghindarkan pemukiman warga dari tergenang air saat musim hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Tuminting. "Agar tidak lagi terjadi banjir," gorong gorong itu nantinya akan punya peran vital sebagai pengatur debit air dan mengarahkan air dari daratan ke laut, Dan di realisasikan pembuatan gorong gorong didanai dengan dana PEN dan Dinas pekerjaan umum dan penata ruang (DPUPR) bertekad melanjutkan revitalisasi selokan di Manado Kepala dinas (PUPR) telah memerintahkan jajaranya, dan swadaya ikut membantu bekerja sama untuk bergerak cepat untuk penanganan Banjir.

Pembuatan gorong-gorong sebagai bagian dari perbaikan sistem drainase berpotensi mengurangi risiko banjir dan genangan di daerah rawan. Pembangunan gorong-gorong sebagai bagian dari sistem drainase memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong perlu menjadi fokus utama dalam upaya penanganan banjir secara efektif dan berkelanjutan. Pembuatan gorong-gorong yang baik dan efektif memerlukan analisis yang cermat terhadap kondisi lingkungan, ketersediaan lahan, dan faktor-faktor teknis lainnya. Dengan mengacu pada referensi-referensi di atas, pembuatan gorong-gorong dapat menjadi bagian yang integral dalam strategi penanganan banjir yang holistik dan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan

bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan (Agustino, 2016).

Kemudian menurut (Tachjan Tahir, 2014), "implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu".

### Penanggulangan

Sebuah organisasi masyarakat sebaiknya dibentuk untuk mengambil tindakan-tindakan awal dan mengatur peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir penanganan saat banjir dan pemulihan setelah banjir.

Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan, Kegiatan penanggulangan banjir mengikuti suatu siklus (life cycle), yang dimulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan untuk pencegahan sebelum bencana banjir terjadi kembali.

Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai sampai wilayah dataran banjir dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir.

### Banjir

Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh lair, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung.

Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat,



terhambatnya aliran air di tempat lain” (Ligak, 2008).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tuminting kota manado. Informan pada penelitian ini yaitu Pemerintahan Kecamatan Tuminting, Kepala-kepala Kelurahan Tuminting dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Langkah analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pembuatan Gorong-gorong Upaya Penanganan Banjir Di Kecamatan Tuminting Kota Manado

Fokus penelitian berorientasi pada masalah, teori yang digunakan dalam memperoleh serta mengarahkan penelitian ini. Implementasi Kebijakan Pembuatan Gorong-gorong upaya Penanganan Banjir Di Kecamatan Tuminting Kota Manado menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan yang sebagai mana dikemukakan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang membangun ikatan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap para pelaksana kebijakan.

### Standar dan Tujuan Kebijakan

Sasaran kebijakan atau tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pembuatan

Gorong-gorong dalam upaya penanganan Banjir sudah tepat yakni direalisasikan ditempat yang rawan banjir .Dalam implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong, penting untuk menetapkan standar dan sasaran yang jelas. Standar harus mencakup spesifikasi teknis gorong-gorong yang akan dibangun, termasuk ukuran, kapasitas, dan bahan konstruksi. Sasaran harus mencakup waktu pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan di danai oleh PEN , dan manfaat yang diharapkan, seperti mengurangi risiko banjir di daerah Tuminting.

Mengenai perbaikan drainase menjadi drainase tertutup atau gorong-gorong hampir seluruh kelurahan yang berada di kawan rawan banjir di Kecamatan Tuminting sudah dibangun saluran drainase tertutup. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR) saat ini sedang membangun gorong-gorong raksasa sebagai upaya mengatasi bencana banjir di wilayah Kecamatan Tuminting. (PUPR) menyampaikan pembangunan gorong-gorong raksasa bertujuan untuk menghindarkan pemukiman warga dari tergenang air saat musim hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Tuminting. "Agar tidak lagi terjadi banjir," gorong gorong itu nantinya akan punya peran vital sebagai pengatur debit air dan mengarahkan air dari daratan ke laut, Dan di realisasikan pembuatan gorong gorong didanai dengan dana PEN dan Dinas pekerjaan umum dan penata ruang (DPUPR) bertekad melanjutkan revitalisasi selokan di Manado Kepala dinas (PUPR). Implementasi Kebijakan Pembuatan Gorong-Gorong berjalan dengan baik dan relevan.

### Sumber Daya

Pembenahan infrastruktur drainase adalah salah satu program kerja dari Walikota dan Wakil Walikota Manado saat ini, yang diharapkan ini menjadi salah satu solusi penanganan banjir di wilayah-wilayah tersebut, Pembiayaan pembangunan gorong-gorong raksasa tersebut yang berada Di kelurahan tuminting dan bersumber dari dari PEN.



Analisis sumber daya sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya termasuk anggaran, tenaga kerja, peralatan konstruksi, dan material bangunan. Ketersediaan sumber daya harus diidentifikasi, alokasi yang tepat harus dilakukan, dan strategi pengelolaan sumber daya harus diterapkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.

Sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam proses pengimplementasian kebijakan ini untuk perbaikan saluran drainase di Kelurahan Tuminting bekerja sama dengan Dinas PUPR Kota Manado dan ada sebagian swadaya masyarakat.

## **Komunikasi**

Komunikasi para stakeholder/agen pelaksana dengan Pemerintah Kecamatan Tuminting sering dilakukan apabila akan dilaksanakan pembangunan, dan biasanya diselenggarakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap Tahunnya. Komunikasi mengenai akan adanya Implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong Penanggulangan Banjir di kecamatan tuminting .

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong untuk penanganan banjir di Kecamatan Tuminting. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif yaitu Transparansi Informasi Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait rencana pembuatan gorong-gorong. Hal ini mencakup tujuan pembangunan, manfaat yang diharapkan, dan tahapan pelaksanaannya. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Adakan pertemuan atau forum partisipasi publik untuk mendengarkan pandangan, masukan, dan kekhawatiran masyarakat terkait pembangunan gorong-gorong.

Sosialisasikan informasi teknis terkait pembangunan gorong-gorong dan manfaatnya

dalam penanganan banjir. Pastikan masyarakat memahami pentingnya proyek ini untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka, Gunakan berbagai saluran media, seperti surat kabar lokal, radio komunitas, dan media sosial, untuk menyebarkan informasi secara luas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Berikan saluran yang jelas bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, atau keluhan terkait proyek. Pemerintah perlu memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap umpan balik yang diterima, Sampaikan informasi tentang dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan gorong-gorong. Pastikan bahwa masyarakat memahami upaya yang diambil untuk meminimalkan dampak negatif.

Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proyek. Bagikan hasil evaluasi kepada masyarakat untuk memberikan gambaran tentang kemajuan dan dampak positif yang telah dicapai. Bentuk kelompok masyarakat atau komite yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap proyek. Dengan begitu komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi lebih efektif, meminimalkan ketidakpastian, dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong untuk penanganan banjir di Kecamatan Tuminting.

## **Karakteristik dan Agen Pelaksana**

Karakter dan agen pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, identifikasi karakter dan agen pelaksana yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan.

Pemilihan agen yang memiliki keahlian teknis, komitmen moral, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan stakeholder lainnya dapat mempercepat proses implementasi. Dalam keseluruhan tingkat keterlibatan dan komitmen agen pelaksana terhadap kebijakan pembuatan



gorong-gorong di Kecamatan Tuminting sangat penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif. Terdapat titik-titik kritis yang harus diperhatikan, seperti dukungan pemerintah, kemampuan agen pelaksana, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

## **Kondisi, Sosial, Ekonomi dan Politik**

Lingkungan sosial dalam hal ini merupakan kesadaran masyarakat dan tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pembuatan gorong-gorong dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Tuminting sangat menjaga kebersihan untuk menghindari adanya penumpukan sampah di saluran drainase maupun di Sungai.

Masyarakat mengeluh karena sebian rumah masyarakat ada yang terambil di bongkar oleh pemerintah, Pembongkaran atau pembangunan infrastruktur dapat memicu respons emosional dari masyarakat yang terkena dampak.

Komunitas yang telah ada selama bertahun-tahun dapat terpisah atau mengalami perubahan signifikan, tergantung pada sejauh mana infrastruktur baru mempengaruhi area tersebut kebijakan serupa mungkin menyebabkan ketidaknyamanan sementara bagi penduduk setempat.

Jika pembuatan gorong-gorong dilakukan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan warga, terutama anak-anak yang harus berangkat ke sekolah.

Usaha mikro dan kecil yang tergantung pada aktivitas ekonomi yang terkena dampak pembongkaran dapat menghadapi kesulitan.

Selain Itu Masyarakat dapat diajak berpartisipasi dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan gorong-gorong, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang infrastruktur lokal.

Proyek pembuatan gorong-gorong dapat menciptakan pekerjaan lokal selama pembangunan dan pemeliharaan.

Pemerintah mengupayakan rehabilitasi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan mengimbangi kerugian yang mungkin dialami oleh individu atau kelompok tertentu.

Implementasi kebijakan ini dapat dianggap sebagai pencapaian tujuan pembangunan daerah oleh pemerintah, yang dapat meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penting untuk mencatat bahwa kesuksesan implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada keterlibatan dan dukungan aktif dari masyarakat setempat serta keberlanjutan dalam pemeliharaan dan manajemen infrastruktur tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa dampak tersebut dapat bervariasi dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran proyek pembongkaran, strategi pengelolaan dampak, dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan pihak terkait.

Selain itu, adopsi kebijakan dan program-program pelatihan atau dukungan sosial ekonomi dapat membantu meredakan dampak negatif yang mungkin timbul.

Penting untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perubahan lingkungan seperti pembuatan gorong-gorong di Tuminting. Hal ini dapat membantu mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta meminimalkan potensi konflik.

## **Disposisi**

Kecenderungan para agen pelaksana bisa dinilai sudah cukup baik namun hasil belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada beberapa kelurahan di kawasan DAS yang belum adanya pembangunan gorong-gorong ada juga yang masih sementara melakukan pembangunan



gorong- goronh sebagai penghalang peluapan air ke daerah pemukiman masyarakat.

Membangun infrastruktur tahan banjir, seperti bendungan, waduk, atau reservoir, untuk mengelola aliran air. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang perilaku yang dapat mengurangi risiko banjir, seperti pembuangan sampah yang tepat.

Dengan memastikan bahwa sistem drainase berfungsi dengan baik dan terpelihara, Kota Manado dapat lebih efektif dalam mengelola risiko banjir dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya.

Pengawasan yang berkelanjutan dan responsif terhadap masalah yang teridentifikasi akan membantu menjaga kinerja sistem drainase dan melindungi kota serta penghuninya dari dampak buruk banjir.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar, Implementasi pembangunan Gorong-gorong di daerah Banjir sangat penting untuk memastikan perlindungan lingkungan. Tujuan standar dan jelas sangat penting, termasuk aspek teknis spesifik, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran, dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko di daerah. Pemerintah wilayah Manado, melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Pekerja Umum (DPUPR), bertanggung jawab untuk pengembangan raksasa Gorong-gorong untuk melindungi lingkungan dari eksploitasi. Pembangunan Gorong-gorong didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, yang mencakup mengidentifikasi tujuan utama pembangunan, menjamin perlindungan lingkungan, dan menerapkan langkah-langkah yang spesifik, efektif, tepat waktu, relevan, dan efisien biaya. Partisipasi pemerintah dalam pengembangan pembangunan Gorong-gorong sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Transparansi dalam proses pengembangan dapat membantu para pemangku kepentingan memahami keberhasilan proyek.

Sumber daya, agen pelaksana dilakukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap Tahun. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adalah penting dalam implementasi kebijakan pembuatan gorong-gorong untuk penanganan banjir di Kecamatan Tuminting. Berikut adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi efektif. Transparansi informasi pemerintah harus memberikan informasi yang transparent dan transparan kepada masyarakat terkait rencana pembuatan gorong-gorong. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan sosialisasikan informasi teknis terkait pembangunan gorong-gorong.

Komunikasi agen pelaksana dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan berjalan sangat baik namun bersifat kondisional, begitupun komunikasi dengan masyarakat mengenai pembangunan kebijakan penanggulangan banjir, komunikasi sering dilakukan secara struktural dari Pemerintah Kecamatan ke Kelurahan ke Kepala-kepala Lingkungan lalu kepada masyarakat.agen pelaksana dilakukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dilaksanakan setiap Tahun. Transparansi informasi pemerintah harus memberikan informasi yang transparent dan transparan kepada masyarakat terkait rencana pembuatan gorong-gorong. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan sosialisasikan informasi teknis terkait pembangunan gorong-gorong.

Karakteristik para agen pelaksana dinilai cukup baik karena pernah adanya observasi dilokasi daerah rawan banjir di Kecamatan Tuminting dan juga menunjukkan sikap loyalitas sebagai agen pelaksana melalui beberapa Pembangunan yang telah direalisasikan

Kebijakan pembongkaran dapat menyebabkan perubahan dalam lingkungan sosial masyarakat, yang terpisah atau mengalami perubahan signifikan, tergantung pada sejauh mana infrastruktur baru mempengaruhi area tersebut kebijakan dan menyebabkan ketidak nyamanan sementara bagi penduduk setempat.



Diposisi, Kecenderungan para agen pelaksana bisa dinilai sudah cukup baik namun hasil belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada beberapa kelurahan di kawasan DAS yang belum adanya pembangunan gorong-gorong ada juga yang masih sementara melakukan pembangunan gorong-gorong sebagai penghalang peluapan air ke daerah pemukiman masyarakat.

Keberhasilan sistem drainase sangat tergantung pada pemahaman yang akurat mengenai topografi dan kondisi hidrologi kota. Analisis topografi yang mendetail memungkinkan para perencana untuk mengidentifikasi area-area berisiko tinggi dan merancang saluran drainase yang mengikuti alur alami aliran air.

Sementara itu, analisis hidrologi, yang menghitung volume air hujan yang harus disalurkan, membantu dalam menentukan kapasitas yang dibutuhkan untuk saluran drainase. Kombinasi kedua analisis ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan infrastruktur drainase yang efektif.

## Saran

Saran kepada pemerintah dan masyarakat terkait pembuatan gorong-gorong dalam upaya penanggulangan banjir yaitu lakukan analisis menyeluruh tentang sistem drainase yang ada di daerah tersebut, termasuk kondisi gorong-gorong yang sudah ada. Identifikasi area yang rawan banjir dan tentukan prioritas pembangunan gorong-gorong baru.

Lakukan perencanaan pembangunan gorong-gorong yang sesuai dengan kapasitas aliran air yang diperlukan untuk menangani banjir. Pastikan gorong-gorong dirancang dengan ukuran yang memadai dan material yang tahan lama. Lakukan pemeliharaan rutin dan pengawasan terhadap gorong-gorong yang ada, termasuk pembersihan agar tidak tersumbat oleh sampah atau material lainnya. Juga, pastikan sistem drainase secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan tidak ada bagian yang rusak.

Lengkapi pembangunan gorong-gorong dengan sistem pelengkap seperti pintu air, pompa, atau tampungan sementara yang dapat membantu mengontrol aliran air saat banjir terjadi.

Libatkan masyarakat dan komunitas dalam proses perencanaan dan pembangunan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran akan pentingnya sistem drainase yang baik, jaga kebersihan lingkungan sekitar, termasuk gorong-gorong, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang tidak sengaja masuk ke gorong-gorong dapat menyebabkan penyumbatan dan mengganggu aliran air.

Edukasi diri sendiri dan anggota komunitas tentang pentingnya drainase yang baik dan peran gorong-gorong dalam mengurangi risiko banjir. Dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya agar dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat saat menghadapi musim hujan. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, pembangunan gorong-gorong yang baik dan perawatan yang rutin dapat membantu mengurangi risiko banjir dan melindungi komunitas dari dampak negatif banjir

## Daftar Pustaka

- Afrijal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grafindo.
- Agust, L., dan Wirarno, B. 2008. Pengertian Kebijakan Publik/Para ahli.
- Djaman, S. 2010. Pengetian Dokumetasi. <https://repository.uin>
- Hadi, M., dan Hanafi, R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik. (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-9
- Hayat.2018.Kebijakan Publik. Malang: Intrans:Publishung.



- Iskandar, J.2012. Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga.
- Joshua, T , Tulusan, F , Pombengi , J . 2023 . Implementasi Program pecegahan Shunting di kabupaten minahasa utara (Studi kasus di keamatan wori). Jurnal Administrasi publik. (JAP).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. Pengertian Banjir. <http://kbbi.web.id/banjir.html>
- Kasmad.2013.Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta: Kedai Aksara
- Kotangon, F., Rares, J., dan Tampongangoy, D. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik.
- M, V., Londa, V., dan Laloma , A. 2022. Impelmentasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan wanea kota manado. jurnal administrasi.
- Mater, V., dan Mater, H. 2010. Implementasi Kebijakan Publik.
- Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Redoskarya.
- Monintja, C., Tulusan, F., dan Plangiten, N. 2017. Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Pariwisata Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik.
- Mulyadi, W. 2015. Implementasi Kebijakan.
- Nugroho, D. R. 2009. Public Policy, Edisi Kedua. Jakarta. PT. ElexMedia Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Perda Kota Manado. 2014. Peraturan Daerah kota Manado Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Kota.
- Purwanto, P. .2020. Analisis Sistem Pengendalian Banjir Sungai Pampang Daerah Aliran Hulu Sungai Karangmumus, Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, 3(2), pp. 44–58.
- Pusut, R, Tampongangoy , D, Tulusan , F. (2022) Implementasi program badan usaha milik desa di desa dalapan Kecamatan Tampam Amma Kabupaten kepulauan talaud. Jurnal Administrasi Publik
- Rahayu, I.P., ROMPAS, W. and DENGGO, S. (2021) ‘Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil)’, JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 7(105).
- Rulinawaty, K. 2013. Studi implementasi Kebijakan Publik. Makassar. Kedai Aksara
- Wibawa S. 2014. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : IntermediaSarsena. 2023. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dea Lumaring Kecamatan Larimpong Kabupaten Luwu. Institut Agama Islam Palopo.
- Sugiyono .2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahyudi I dan Kurniawan L. J. 2008. Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis. Malang: In-Trans Publishing
- Wibawa S. 2014. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia